

## PENGARUH ALOKASI BELANJA RUTIN DAN BELANJA MODAL PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

I G A Agung Astia Dewi<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [astiadewi@yahoo.com](mailto:astiadewi@yahoo.com) / telp: +62 85 935 23 42 22

### ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif dan menggunakan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ialah metode observasi non perilaku berupa studi dokumentasi. Data penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model dengan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* hanya 17,3%. Data penelitian ini diolah dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan pada IPM sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Kegagalan belanja modal memengaruhi IPM ini terjadi karena masih rendahnya alokasi belanja modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta alokasi belanja modal belum dilaksanakan dengan tepat sasaran.

**Kata kunci:** belanja rutin, belanja modal, indeks pembangunan manusia

### ABSTRACT

*Human Development Index (HDI) is an indicator that can be used measuring the welfare. The aim of this study is determine the effect of the allocation recurrent expenditure and capital expenditure on HDI at District/City Province Bali. This study uses quantitative approach using a form of associative and secondary data obtained through collecting data with non behavioral observation method form study documentation. Data of this study have passed the classic assumptions test and the suitability of the model test with Adjusted R<sup>2</sup> value is 17.3%. The research data was processed using multiple linear regression analysis technique. The analysis showed that recurrent expenditure significantly and positive impact on the HDI while capital expenditure no significantly and negative impactt on the HDI. The failure of the capital expenditure affect HDI because in addition to the low amount of capital expenditures allocated in improving the welfare of society and the allocation of capital expenditures have not been implemented on target.*

**Keywords:** recurrent expenditure, capital expenditure, human development index

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah telah terlaksana sejak tahun 2001 di Indonesia, tepatnya pada 1 Januari 2001. Adanya kebijakan ini, membuat setiap daerah provinsi, kabupaten maupun kota memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan seminim mungkin intervensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dirasa lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya karena masing-masing daerah dapat lebih leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti, 2013).

Selaku pemerintah daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah daerah dijadikan sebagai titik sentral dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia termasuk salah satunya desentralisasi fiskal. Menurut Yusuf (2014), adanya desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah tidak hanya dapat menggali sumber keuangan potensial di daerahnya saja, melainkan juga dapat melakukan peran alokasi sumber daya yang dimiliki secara mandiri ke dalam belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah setempat.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang turut merasakan dampak dari adanya kebijakan otonomi daerah. Dampak diberlakukannya kebijakan ini dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja daerah pada program atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun proses penyusunan APBD tidak selamanya berjalan dengan baik. Penyusunan APBD seringkali berbenturan dengan kepentingan politis antara pihak eksekutif dan legislatif yang ingin memaksumumkan utilitas dirinya masing-masing. Teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa, masyarakat yang diprosikan oleh legislatif berperan sebagai prinsipal (pihak yang memberi wewenang) dan eksekutif berperan sebagai agen (pihak yang melakukan tindakan sesuai dengan wewenang atau kehendak prinsipal). Eksekutif diberikan wewenang oleh legislatif untuk merancang APBD untuk jangka waktu satu tahun dan secara bersama-sama mengesahkannya.

APBD tersusun atas komponen penerimaan daerah dan belanja daerah. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014). Belanja adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang tidak menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah. Belanja dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, dan Transfer sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Belanja Operasi (belanja rutin) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya.

Menurut Badrudin dalam Zebua (2014), pemerintah melakukan belanja daerah baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja modal dengan harapan terjadi peningkatan aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Namun, dewasa ini alokasi belanja daerah masih dipandang belum efektif dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin rendahnya alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadinya peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah.

Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahunnya. Belanja modal juga digunakan untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pembelanjaan lain yang dipandang kurang sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Belanja modal semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memadai yang justru perlu ditingkatkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Yudhoyono, 2011 dalam Zebua, 2014).

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai suatu indeks gabungan yang meliputi tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan (dilihat dari indeks angka harapan hidup), indikator pendidikan (dapat dilihat dari rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf), indikator ekonomi (dapat dilihat dari pengeluaran riil per kapita). Ketiga indikator tersebut dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM niscaya akan terwujud dengan pengalokasian belanja daerah khususnya belanja rutin dan belanja modal secara tepat. Menurut Sahrah (2007, dalam Badrudin, 2011) alokasi belanja daerah di bidang kesehatan hendaknya mampu meningkatkan angka harapan hidup yang merupakan komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Alokasi di bidang pendidikan akan mengantarkan masyarakat pada pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga berdampak pada peningkatan angka melek huruf. Alokasi belanja di bidang infrastruktur dilakukan dengan harapan akan memberi kontribusi dan mempermudah akses bagi masyarakat dalam perekonomian, sehingga akan terjadi efisiensi dan pada waktunya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang semakin tinggi (Delavallade, 2006).

Penelitian Sasana (2012) yang mengklasifikasikan belanja daerah menjadi belanja langsung dan tidak langsung menunjukkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Belanja langsung diperuntukkan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang peningkatan produktivitas masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Belanja pemerintah daerah juga diperuntukkan bagi layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang harus diperoleh masyarakat. Tepatnya pengalokasian belanja langsung seperti pengadaan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengalokasian belanja tidak langsung secara tepat juga akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sumiyati (2009) dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat mengenai Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil pengujian Zebua (2014) menunjukkan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh pada IPM dengan arah yang positif dan signifikan, sedangkan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja rutin belum sepenuhnya berkontribusi dalam

upaya capaian pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah.

Penelitian-penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa struktur belanja APBD dapat dikatakan belum dialokasikan secara tepat dalam upaya peningkatan pembangunan kualitas manusia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui hubungan antara alokasi belanja rutin dan belanja modal dengan IPM di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan seluruh komponen dari belanja rutin dan belanja modal agar lebih menggambarkan pengaruh alokasi belanja rutin dan belanja modal secara keseluruhan pada peningkatan IPM. Belanja Rutin terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, sedangkan Belanja Modal terdiri atas Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya.

Sasana (2012) menyatakan bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki IPM yang tinggi pula. Tingkat IPM yang tinggi pun belum tentu merupakan kontribusi penuh dari alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencapaian tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu sendiri (Badrudin, 2011). Namun, pengalokasian belanja rutin dan belanja modal yang dilakukan secara tepat akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui “Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Alokasi Belanja Rutin berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ? Apakah Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi pengaruh positif Alokasi Belanja Rutin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan untuk mengkonfirmasi pengaruh positif Alokasi Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan tersebut, adapun kegunaan penelitian ini jika dilihat dari segi teoritis ialah hasil penelitian ini hendaknya mampu memberikan deskripsi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kegunaan praktisnya ialah hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan melakukan peran alokasi secara tepat pada belanja rutin dan belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Teori *fiscal federalism*. Menurut Jensen dan Meckling (1976, dalam Wertianti, 2013), hubungan keagenan dalam teori

keagenan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (*contract*) antara satu atau lebih prinsipal (pihak yang memberi wewenang) dengan agen (pihak yang melakukan tindakan sesuai dengan kehendak prinsipal). Agen diberikan kewenangan dalam pembuatan keputusan oleh prinsipal. Teori ini menggambarkan konflik yang muncul antara prinsipal dan agen seperti adanya informasi asimetris (*information asymmetry*) dimana agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal dan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang diakibatkan oleh adanya ketidaksamaan tujuan antara agen dan prinsipal dan mereka ingin memaksimalkan utilitas diri masing-masing.

Hubungan antara masyarakat (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen) merupakan keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini. Masyarakat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Sebagai kontribusi dalam pemberian sumber daya kepada daerah, masyarakat selaku prinsipal telah membayar pajak, retribusi dan sebagainya kepada daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Selaku agen, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pengalokasian belanja daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik yang memadai. Dimana pemenuhan kebutuhan publik tersebut didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya turut memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dinyatakan dalam teori *fiscal federalism* yang terbagi atas dua perspektif yakni teori tradisional dan teori perspektif baru. Hayek (1945) mengemukakan bahwa teori tradisional menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi. Keuntungan alokatif ini menyatakan penggunaan *knowledge in society* yang menyiratkan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dan adanya dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik. Musgrave (1959) dan Oates (1972) mengemukakan teori perspektif baru yang lebih menekankan bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi perilaku pemerintah daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam membuat peraturan tentang ekonomi lokal membuat campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

Pemerintah daerah akan meningkatkan usahanya dan memberikan pelayanan publik yang lebih layak dengan penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi. Tirtosuharto (2010) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan struktur insentif yang lebih besar bagi pemerintah untuk lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya keuangannya terutama yang berkaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Belanja rutin merupakan pengeluaran anggaran yang memberi manfaat jangka pendek dan dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Pengeluaran ini tidak menambah aset kekayaan bagi daerah (Baswir, 2000). Adapun komponen-komponen dari belanja rutin meliputi Belanja Pegawai,

Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja modal adalah belanja daerah yang manfaatnya cenderung lebih dari satu tahun anggaran. Selain menambah kekayaan pemerintah, belanja modal juga menimbulkan biaya operasional dan pemeliharaan sehingga anggaran rutin pun akan turut bertambah (Mardiasmo, 2009:67). Belanja modal berfungsi untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja Modal dapat dikelompokkan menjadi belanja aset tetap seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset lainnya.

Tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didefinisikan sebagai suatu indeks komposit yang mencakup tiga kebutuhan dasar dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia antara lain indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia didasari oleh komponen dasar kualitas hidup, yaitu capaian di bidang kesehatan yang diukur dalam indeks harapan hidup, capaian di bidang pendidikan dengan mengukur angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun ke atas dan mengukur rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh tingkat pendidikan formal yang dijalani), dan indeks standar kehidupan yang layak, yang diindikasikan dengan daya beli/konsumsi riil perkapita.

IPM dapat mengetahui kondisi pembangunan di daerah dengan alasan IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. IPM juga dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja daerah dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk. Meskipun menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini IPM merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia

Perhitungan IPM disajikan dalam rumus berikut ini.

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

X1 = indeks konsumsi perkapita yang disesuaikan

X2 = indeks angka harapan hidup

X3 = indeks pendidikan =  $\frac{2}{3}$  (indeks melek huruf) +  $\frac{1}{3}$  (indeks rata-rata lama bersekolah)

Penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-1,0 (Mudrajad, 2003 dalam Artaningtyas, 2011) terdiri dari : Kategori rendah (nilai IPM 0-0,5), Kategori menengah (nilai IPM antara 0,51-0,79), dan Kategori tinggi (nilai IPM 0,8-1).

Menurut Badrudin dalam Zebua (2014), alokasi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja rutin diharapkan akan memicu aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Salah satu jenis belanja rutin yaitu belanja barang

dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Zebua, 2014). Sasana (2012) menyatakan bahwa belanja daerah yang mencakup belanja tidak langsung, dimana sebagian besarnya merupakan komponen belanja rutin memiliki pengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia. Pengalokasian belanja rutin secara tepat akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan kualitas manusia (Sasana, 2012).

Ha.1: Belanja Rutin berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Zebua (2014) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Mirza, 2012). Peningkatan alokasi belanja modal semestinya juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM.

Ha.2: Belanja Modal berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda, dkk.,2004:17). Lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian yang

diambil adalah seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2010-2013 merupakan obyek penelitian ini. Adapun variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja Rutin (X1) dan Belanja Modal (X2).

Data berjenis kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data kuantitatif yaitu data berupa angka atau data kualitatif yang diubah dalam bentuk angka dengan jalan memberi skor. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini dapat berbentuk kata, kalimat, maupun gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil analisis. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2013 yang terdapat di Biro Keuangan Provinsi Bali dan dokumen yang terdapat di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2013 dan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam periode 2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode penentuan sampel berupa metode sampling jenuh, dimana keseluruhan anggota populasi merupakan anggota sampel. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2010-2013 yang mencakup sembilan kabupaten/kota (delapan kabupaten dan satu kota dengan kurun waktu empat tahun). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yakni metode observasi non perilaku berupa studi dokumentasi. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan pencatatan, pengutipan serta pengumpulan data dari dokumen yang terdapat di Biro Keuangan Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, hasil penelitian sebelumnya maupun buku-buku literatur dalam membentuk argumentasi sebagai pendukung hasil analisis penelitian.

Penggunaan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dimanfaatkan dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini dengan teknik analisis Regresi Linear Berganda. Adapun tahapan analisisnya antara lain, uji asumsi klasik (dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi normal dan hasil estimasi regresi yang harus benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda (menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen), uji kesesuaian model (menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan atau tidak), koefisien determinasi (untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya) dan uji hipotesis (untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Banyak turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali karena keindahan alam, keramahan penduduk dan kekentalan budaya daerahnya. Provinsi Bali tidak hanya terdiri atas Pulau Bali saja, tetapi juga terdiri atas beberapa pulau kecil yang tersebar di sekitar Pulau Bali. Disamping itu, Bali memiliki pegunungan dengan danau disekitarnya seperti Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Batur, dan Danau Tamblingan.

Bali yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini memiliki wilayah seluas 5 636.66 km<sup>2</sup>. Wilayah Bali ini terbagi menjadi sembilan Kabupaten/Kota dan pusat pemerintahan Provinsi Bali terletak di seputaran Renon wilayah Kota Denpasar. Adapun sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali meliputi Kabupaten Gianyar, Badung, Klungkung, Karangasem, Bangli, Tabanan, Jembrana, Buleleng dan Pemerintahan Kota Denpasar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali**

No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1.	Kab. Jembrana	Negara	841.80
2.	Kab. Tabanan	Tabanan	839.33
3.	Kab. Badung	Mangupura	418.52
4.	Kab. Gianyar	Gianyar	368.00
5.	Kab. Klungkung	Semarapura	315.00
6.	Kab. Bangli	Bangli	520.81
7.	Kab. Karangasem	Amlapura	839.54
8.	Kab. Buleleng	Singaraja	1 365.88
9.	Kota Denpasar	-	127.78

Sumber: bps.bali.go.id

Penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah terlaksana sejak tahun 2001. Adanya kebijakan ini membuat setiap daerah memiliki kekuasaan

dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan seminim mungkin intervensi dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, mampu memberi keleluasaan bagi pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dalam hal melakukan alokasi-alokasi belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah, baik belanja rutin maupun belanja modal semestinya dialokasikan dengan tepat sasaran guna mencapai kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan publik yang memadai, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Provinsi Bali berada di peringkat ke-15 dilihat dari peningkatan IPM secara nasional pada tahun 2013. Sementara itu sebagai perbandingan, pada tahun 1996 Provinsi Bali berada pada peringkat ke-8 dengan nilai IPM mencapai 70,1 persen. Belasan tahun kemudian, di tahun 2013 nilai IPM yang dicapai Provinsi Bali meningkat menjadi 74,11, namun dengan peringkat yang menurun di posisi limabelas. Kedua pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Bali cenderung mengalami peningkatan namun laju peningkatannya masih kalah dengan provinsi lain secara umum di Indonesia.

Di tahun 2013 IPM Provinsi Bali mencapai angka 74,11 persen dengan perbaikan angka pada indikator usia harapan hidup dari angka 70,72 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,2 tahun di tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di provinsi Bali meningkat dari 8,21 tahun di tahun 2010 menjadi 8,58 di tahun 2013. Pada indikator angka melek huruf, capaian di Provinsi Bali pada tahun 2010 dan 2013 meningkat dari 88,4 menjadi 91,03 persen. Pengeluaran riil per kapita pada tahun

2010 sampai 2013 juga turut mengalami peningkatan Rp 636.670,00 menjadi Rp 643.780,00. Peningkatan IPM Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2010-2013**

Keterangan Komponen IPM	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Angka harapan hidup (tahun)	70.72	70.78	70.84	71.2
Angka melek huruf (%)	88.4	89.17	90.17	91.03
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8.21	8.35	8.57	8.58
Konsumsi riil per kapita (Rp.000,-)	634.67	637.86	640.86	643.78
IPM (%)	72.28	72.84	73.49	74.11

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Penelitian ini terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota yang terdapat di Provinsi Bali dengan menggunakan data *time series* yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Total data penelitian yakni sebanyak 36 amatan (9 kabupaten/kota x 4 tahun). Dari 36 data amatan, terdapat dua data amatan yang mengalami *outlier*, sehingga jumlah data amatan menjadi 34 amatan. *Outlier* merupakan data berkarakteristik unik yang mengakibatkan data tersebut terlihat berbeda sangat jauh dari observasi lainnya sehingga muncul sebagai nilai yang ekstrem baik dalam bentuk variabel tunggal maupun kombinasi (Ghozali, 2011). Hal ini menyebabkan data *outlier* harus dikeluarkan dari analisis agar tidak memberikan hasil analisis yang menyimpang. Proses identifikasi *outlier* dilakukan dengan mentransformasi data ke bentuk Zscore.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized residual
N	34
Kolmogorov – Smirnov Z	1,301
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,068

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) dalam One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang tampak pada Tabel 3 adalah sebesar 0,068 ( $> 0,05$ ), dengan demikian  $H_0$

diterima. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji autokorelasi dilakukan untuk melacak adanya korelasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin – Watson
1	1,380

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan nilai Dw yang dihasilkan sebesar 1,380. Dari jumlah n sebanyak 34, diperoleh nilai  $d_L$  dan  $d_U$  masing-masing sebesar 1,33 dan 1,58 serta nilai  $4-d_U$  dan  $4-d_L$  masing-masing adalah 2,5 dan 2,67, sehingga  $d_L < Dw < d_U$  ( $1,33 < 1,380 < 1,58$ ). Nilai Dw sebesar 1,380 terletak diantara nilai  $d_U$  dan  $d_L$  yang merupakan daerah tidak ada keputusan, maka dari itu pengujian selanjutnya dilakukan dengan metode statistik nonparametrik yaitu uji runs. *Runs test* merupakan bagian dari statistik nonparametrik yang juga dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi tinggi. Hasil pengujian autokorelasi dengan uji runs disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Runs**

	Unstandardized Residual
N	12
Z	-1,916
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,055

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Uji runs (*runs test*) menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,055 ( $>0,05$ ) seperti yang terlihat pada tabel 5. Hasil ini memiliki arti bahwa tidak terkandung gejala autokorelasi dalam data penelitian ini.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi yang dibuat dilihat berdasarkan matriks korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ln_Belanja_Rutin	0,528	1,892
Ln_Belanja_Modal	0,528	1,892

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Hasil analisis pada tabel 6, menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,528 (>0,1) dan nilai VIF sebesar 1,892 (<10) untuk variabel Belanja Rutin dan Belanja Modal. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji ini ialah tidak terkandung gejala multikolinearitas dalam data penelitian ini.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Heteroskedastitas**

Model	Sig.
1 (Constant)	0,236
Ln_Belanja_Rutin	0,310
Ln_Belanja_Modal	0,887

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7, didapatkan hasil untuk nilai signifikansi masing-masing variabel independen terhadap nilai *absolute residual* dengan nilai lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memberi kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data penelitian .

Sejumlah 34 amatan telah lolos uji asumsi klasik dan diperoleh nilai deskripsi statistik yang memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata dari data penelitian. Hasil deskripsi statistik penelitian tersaji pada Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8.**  
**Hasil Deskripsi Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Belanja_Rutin	34	398.624.740.490,00	1.514.921.883.719,96	768.722.413.795,81
Belanja_Modal	34	42.555.098.646,00	627.705.700.331,07	124.931.727.626,05
IPM	34	66,42	78,80	72,94
Valid N (listwise)	34			

*Sumber:* Data Sekunder Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 8, maka dapat dijelaskan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalokasikan belanja rutin tertinggi sebesar Rp 1.514.921.883.719,96, terendah sebesar Rp 398.624.740.490,00 dengan rata-rata sebesar Rp 768.772.413.795,81. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalokasikan belanja modal tertinggi sebesar Rp 627.705.700.331,07, terendah sebesar Rp 42.555.098.646,00 dengan rata-rata sebesar Rp 124.931.727.626,05. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tingkat 78,80 persen, terendah pada tingkat 66,42 persen dengan rata-rata pada tingkat 72,94 persen.

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F)**

Model	F	Sig.
1 Regression	4,457	0,020
Residual		
Total		

*Sumber:* Data Sekunder Diolah, 2015

Hipotesis alternatif diterima apabila  $p\text{-value} < 0,05$ , dan hipotesis alternatif ditolak apabila  $p\text{-value} > 0,05$ . Tabel 9 menunjukkan bahwa  $p\text{-value}$  sebesar 0,020 ( $< 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi IPM.

**Tabel 10.**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,223	0,173

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,173. Nilai tersebut menjelaskan bahwa hanya 17,3 persen perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel belanja rutin dan belanja modal. Sisanya sebesar 82,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln IPM} = 2,808 + 0,063 \text{ Ln Belanja Rutin} - 0,01 \text{ Ln Belanja Modal} \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta 2,808 berarti bahwa apabila alokasi belanja rutin dan belanja modal konstan maka IPM akan meningkat sebesar 2,808 persen. Koefisien regresi Belanja Rutin menunjukkan nilai 0,063 yang berarti apabila alokasi belanja rutin naik sebesar satu persen, maka IPM akan meningkat sebesar 0,063 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi Belanja Modal menunjukkan nilai -0,01 yang berarti apabila alokasi belanja modal naik sebesar satu persen, maka IPM akan menurun sebesar 0,01 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

**Tabel 11.**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model	B	t	Sig
1 (Constant)	2,808	5,635	0,000
Ln_Belanja_Rutin	0,063	2,535	0,016
Ln_Belanja_Modal	-0,010	-0,595	0,556

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel 11 untuk pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen menjelaskan bahwa hasil uji hipotesis mengenai pengaruh belanja rutin (X1) pada IPM (Y) menunjukkan *p-value* sebesar 0,016, berada dibawah nilai  $\alpha$  sebesar 0,05. Hasil ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi belanja rutin (X1) pada Tabel 11 menunjukkan arah positif. Hasil ini berarti bahwa belanja rutin berpengaruh positif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis Ha<sub>1</sub> diterima. Pengalokasian belanja rutin pada sektor-sektor pembangunan kualitas manusia secara tepat akan turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adanya puskesmas dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) maupun pemeliharaan terhadap infrastruktur serta sarana prasarana publik. Alokasi belanja rutin secara tepat juga dapat meningkatkan pelayanan di masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sasana (2012) menyatakan bahwa belanja tidak langsung yang juga merupakan komponen belanja rutin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil uji pengaruh belanja modal (X2) pada IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,556 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM. Pada Tabel 11 dapat dilihat nilai koefisien regresi belanja modal (X2) menunjukkan arah yang negatif, yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif belanja modal pada IPM. Hasil ini menunjukkan

bahwa belanja modal berpengaruh negatif pada IPM atau dengan kata lain hipotesis  $H_{a.2}$  ditolak. Hasil penelitian ini gagal membuktikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirza (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Sebaliknya, penelitian ini sesuai dengan penelitian Paramita (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Wahyu (2014) juga menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada IPM. Kegagalan belanja modal memengaruhi IPM ini terjadi, disamping karena masih rendahnya jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian belanja modal belum dilaksanakan secara tepat sasaran. Adanya pengalokasian belanja modal pada urusan pemerintah yang tidak terkait dengan masyarakat seperti pengadaan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan gedung pemerintahan yang berlebihan turut menjadi faktornya. Kegagalan ini juga kemungkinan terjadi karena adanya belanja modal yang terhenti di tengah jalan pengerjaan, tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat (mubasir) atau karena belanja modal yang dilakukan saat ini baru dirasakan manfaatnya beberapa tahun ke depan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini ialah belanja rutin berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengaruh positif ini berarti pengalokasian belanja rutin pada sektor-sektor pembangunan kualitas manusia secara tepat akan turut

berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Kegagalan belanja modal memengaruhi IPM ini terjadi, disamping karena masih rendahnya jumlah alokasi belanja modal, juga dikarenakan pengalokasian belanja modal belum dilaksanakan secara tepat sasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi saran yang dapat diberikan antara lain: Pemerintah Daerah hendaknya memiliki kepastian dan aturan yang jelas tentang besaran alokasi anggaran sektor publik jika masih menginginkan proses pembangunan manusia di Provinsi Bali berjalan secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengalokasikan Belanja Rutin dan Belanja Modal dengan sebijak mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian, peneliti selanjutnya dapat menggunakan data belanja daerah dengan lebih spesifik yang terkait langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia seperti belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur, peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan data terbaru tahun 2014 guna memperoleh gambaran terbaru mengenai perkembangan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Bali serta dapat memperpanjang jangka waktu/periode penelitian agar mampu melakukan generalisasi pada hasil penelitian.

## **REFERENSI**

Aristovnik, A. 2012. Fiscal Decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective. *MPRA Paper No. 39316*, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.

- Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi Pembangunan*, 9(1), h: 23-30.
- Connolly, Anne Therese, Cara Marie De Leoz, Miguel Gorospe, And Marajella Sebastian. 2014. Determinants Of Having A High Human Development Index. *A Qualitative Analysis On Human Development Of Countries All Over The World*.
- Delavallade, Clara. 2006. Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries. *Journal of Economics and Finance*. 30(2) pp: 222-239.
- Engineer, Merwan, Ian King and Nilanjana Roy. 2008. The Human Development Index As A Criterion For Optimal Planning. *Indian Growth and Development Review*, 1 (2), pp: 172-192.
- Faridi, M.Zahir. 2011. Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), pp: 1-33.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayek, F.A. 1945. The Use of Knowledge In Society. *The American Economic Review*, 35(4), pp: 519-530.
- Lubis, Ade Zul Akhir. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara Asean-4). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (19).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1 (1), h:1-15.
- Moghaddam, Abdolmajid Arfaei, Marof Redzuan and Amaludin AB, Rahman. 2012. Globalization, Income Growth and Human Development Index: Experience of Iran. *Elixir Social Studies* 52, pp: 11297-11301.

- Mulyono. 2012. The Impact Of Fiscal Decentralization On Regional Economic Development In Indonesia For The Periods 2005-2008. *Paper*. International Cooperation Policy.
- Musgrave, Richard. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Econom.* New York: McGraw.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- Onafalujo and Ikpefan. 2014. A Critique Of Public Investments In The Local Government System In Nigeria. *Fountain Journal Of Management And Social Sciences*, 3(1), pp: 1-15.
- Paramita, Ahsani. 2012. Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makassar.
- Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pose Andres Rodriguez and Anne Kroijer. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. *'Europe in Question' Discussion Paper Series*. The London School of Economics and Poliyical Science.
- Rahyuda, I Ketut, IGW Murjana Yasa dan I Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar : Universitas Udayana Press.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development And Economic Growth. *Center Discussion Paper No. 887*.
- Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1).
- Stanton, Elizabeth A. 2007. The Human Development Index: A History. *Workingpaper Series*. Number 12. Global Development And Environment Institute Tufts University.
- Sumiyati, Euis Eti. 2009. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal*. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNJANI.
- Suryarini, Trisni. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), h: 207-216.

Tirtosuharto, Darius. 2010. The Impact Of Fiscal Decentralization And State Allocative Efficiency On Regional Growth In Indonesia. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 2 (2).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wahyu, I Putu Adita. 2014. Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Wertianti, I G A Gede. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3, pp: 567-584.

Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.